

# ***Perbandingan Kurikulum Pendidikan Indonesia dengan Negara Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang dan Finlandia***

Oleh:

**Tutik Haryanti dan M. Nazir Karim**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

*Email: 22290126013@students.uin-suska.ac.id*

## ***Abstract***

*Each country has its own national education system, which is adapted to the national philosophical background, policies and strategies, which are also influenced by the state structure adopted and the goals to be achieved within the framework of the nation and state. One effort to improve the quality of a country's education is with a curriculum policy. Therefore, this article aims to analyze education curriculum policies in Indonesia in terms of comparison with five countries, namely Malaysia, Singapore, South Korea, Japan and Finland. The method used is literature review. From the results of data analysis, it was found that curriculum policy in Indonesia is still far behind those of the five countries, so there is a need for changes in the curriculum regulations established by the Indonesian government. The current curriculum policy still has not achieved the goals of the national education system.*

**Keywords** *Comparison, Policy, Curriculum, Education*

## **A. Pendahuluan**

Sejarah pendidikan Indonesia telah menunjukkan bahwa pendidikan, apapun bentuknya, selalu berperan penting dalam membentuk karakter individu masyarakat. Meskipun sistem penerapannya berbeda, pelatihan dan pembinaan untuk keberhasilan kurikulum pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama.<sup>1</sup> Pendidikan merupakan tolak ukur suatu negara atau bangsa yang maju, pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan kelangsungan negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional di bidang perekonomian, kebudayaan, kesehatan dan agama. Pendidikan merupakan alat yang paling penting untuk mencapai tujuan suatu negara karena semua kebutuhan suatu negara harus didasarkan pada pengetahuan yang tepat.

Setiap negara mempunyai sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan latar belakang filosofi, kebijakan dan strategi nasionalnya, dan secara keseluruhan

---

<sup>1</sup> & Sumarta Ulinniam, Sarwo Edy, 'Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Indonesia Dari Masa Ke Masa (Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional)', *Jurnal Sinau*, 9.1 (2023), 127–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37842/sinau.v9i1.141>>.

dipengaruhi oleh sistem nasional yang dianut serta tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka nasional dan nasional. Seiring berjalannya waktu, kurikulum mengalami perubahan besar. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan institusi pendidikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan generasi yang berkualitas. Kurikulum merupakan salah satu alat penting dalam pembelajaran. Perubahan kurikulum di Indonesia telah terjadi beberapa kali hingga sekarang ini yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Perubahan ini bertujuan agar guru dan siswa tidak ketinggalan dalam perkembangan pendidikan<sup>2</sup>.

Pengembangan kurikulum adalah proses merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kurikulum. Tujuannya adalah menciptakan kurikulum yang dianggap ideal<sup>3</sup>. Kurikulum memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. Kurikulum sangat penting dalam konteks pembangunan pendidikan nasional di masa depan. Kurikulum dapat dianggap sebagai “jantung” dunia pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum ke depan harus direncanakan dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional<sup>4</sup>.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah studi komparatif kurikulum pendidikan, yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan Indonesia dan negara lain, terutama aspek yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan. Untuk itulah pada kesempatan kali ini penulis mencoba mengkaji dan menguraikan perbandingan kurikulum pendidikan terhadap beberapa negara khususnya Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang dan Finlandia.

Sistem manajemen dari kelima negara ini terdapat kemiripan dengan sistem kurikulum di Indonesia, yaitu gabungan antara sentralistik dan desentralisasi. Kondisi ini sebenarnya sedikit berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia yang mana masalah sepenuhnya bersifat sentralistik tanpa memberi kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan proses pendidikan, yang walaupun saat ini Indonesia sudah masuk dalam era desentralisasi tapi proses pengolahan pendidikan khususnya aspek anggaran daerah masih belum menaruh perhatian penuh terhadap pendidikan. Penulis tertarik untuk mengkaji ke enam Negara ini di karenakan negara-negara ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dalam hal sektor industri, ekonomi maupun pendidikan itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Sefri Yanda, ‘Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Kurikulum Pendidikan: Analisis Pendekatan, Tujuan Dan Fungsi, Serta Implikasinya Pada Pendidikan Islam’, *Researchgate.Net*, 2023, pp. 11–26 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20571.34086>>.

<sup>3</sup> Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015).

<sup>4</sup> Armansyah Putra, ‘Mengkaji & Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika Dan Finlandia)’, *Osf.Io*, 2017 <<https://osf.io/preprints/inarxiv/vdz32/download>> [accessed 18 April 2024].

Penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data dan informasi faktual serta menggali sumber-sumber yang terdapat dalam jurnal maupun artikel ilmiah, ensiklopedia, dokumen serta sumber data lainnya yang relevan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif analitis. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik interpretatif dan analitis. Metode interpretasi digunakan untuk membaca gagasan-gagasan penelitian terdahulu, yang kemudian digunakan untuk menganalisis kebijakan kurikulum masing-masing negara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perkembangan Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia**

Perjalanan kurikulum di Indonesia sampai sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakannya. Namun dari setiap perubahan yang dilakukan pemerintah, tidak boleh lepas dan harus dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Aspek manajemen kurikulum memerlukan konsistensi antara kurikulum dengan pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Dengan kata lain: Pertama, kurikulum didasarkan pada tujuan atau sasaran kurikulum, yaitu tujuan kurikulum. Yang kedua adalah kurikulum berdasarkan perspektif berdasarkan konteks dimana kurikulum tersebut digunakan. Ketiga, kurikulum didasarkan pada perspektif strategis terhadap pengembangan kurikulum yang dipilih. Perkembangan juga tidak lepas dari proses, strategi pembelajaran yang dipilih, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Inilah sisi lain dari makna kurikulum sebagai suatu proses.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 (kurikulum Rentjana Pelajaran), 1952 (kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai), 1964 (kurikulum Rencana Pendidikan), 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), kurikulum 2013 dan yang sekarang adalah kurikulum merdeka yang walaupun belum merata di satuan pendidikan seluruh Indonesia diterapkan.

---

<sup>5</sup> Dinn Wahyudin, 'Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Profesi Guru (Studi Kasus Di Universitas Pendidikan Indonesia)', *Jurnal Kependidikan*, 46.2 (2016), 259-70 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/jk.v46i2.11625>>.

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Bila ditinjau dari permasalahan pendidikan, khususnya kurikulum negara Indonesia dapat dikategorikan negara yang kurikulum pendidikannya masih rendah, bila dikomparasi dengan negara yang sudah maju sistem pendidikannya. Ditambah pembuktian dari laporan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) melakukan survei internasional menggunakan tes yang disebut dengan program untuk penilaian siswa internasional (PISA).<sup>6</sup> Sejak tahun 2013/2014, Indonesia mulai menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah untuk kelas 1, 4, 7 dan 10. Implementasi kurikulum 2013 ini akan dilakukan secara bertahap sampai diterapkan seluruh kelas di Indonesia pada tahun 2020.<sup>7</sup> Pengembangan kurikulum 2013 khususnya terletak pada keseimbangan pengetahuan, sikap, keterampilan, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, model pembelajaran (Penemuan, Berbasis Proyek dan Berbasis Masalah), dan penilaian otentik.

Pada tahun 2022-2023 pemerintah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Adapun karakteristik dari kurikulum merdeka adalah pengembangan *soft skill* dan karakter, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel.<sup>8</sup>

## 2. Kebijakan Kurikulum Malaysia

Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari Pra-sekolah, Pendidikan Rendah, Pendidikan Menengah, Pendidikan Pra-Universiti dan Pengajian Tinggi. Pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah federal. Di Malaysia, warga negaranya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta

---

<sup>6</sup> Nurhizrah Putra, Irdhan Epria Darma, Rusdinal, Dan Gistituati, 'Perbandingan Kurikulum Pendidikan Indonesia Dan Finlandia', *Journal on Education*, 6.1 (2023), 7436–48 <<http://jonedu.org/index.php/joe>>.

<sup>7</sup> Gadis Nianti Rohyadi, Edi, Dewi, Ratna Sari dan Pertiwi, 'Analisis Perbandingan Kurikulum Negara Indonesia Dengan Negara Lain', *Jurnal IKA PGSD*, 14.2 (2023), 187–94 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36841/pgsdunars.v14i2.3895>>.

<sup>8</sup> Hengki Nurhuda, 'Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan', *Dirasah Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar*, 5.2 (2022), 127–37 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51476/dirasah.v5i2.406>>.

maupun secara individu. Hal ini sama dengan Indonesia. Meskipun, bentuk pemerintahan adalah kerajaan, namun kerajaan tak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang harus diterapkan. Semua kewenangan tersebut telah sepenuhnya dilimpahkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, sementara untuk peraturan pendidikan tinggi diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Mulai dari tahun 2003 hingga saat ini, Malaysia telah menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran tertentu seperti sains dan matematika. Sistem pendidikan yang dimiliki sekolah di Malaysia yaitu terkait dengan sistem kebahasaannya mewajibkan bahasa Inggris dan bahasa Melayu,<sup>9</sup> sedangkan di Indonesia hanya mewajibkan bahasa Indonesia saja.

Untuk sekolah formal di Malaysia terdiri dari dua jenjang yaitu sekolah rendah atau setingkat SD yang ditempuh dengan masa pendidikan 6 tahun dan SMA kerajaan yang ditempuh selama 5 tahun, sedang Indonesia 6 tahun. SMA kerajaan di Malaysia jika dihubungkan dengan jenjang di Indonesia, merupakan gabungan dari SMP dan SMA. Pembagian jurusan di *Royal High School* dimulai di kelas 4, atau tahun keempat dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa siswa di sekolah menengah kerajaan di Malaysia, di kelas 1 sampai 3, mengikuti mata pelajaran dasar yang sama yaitu matematika, IPA, pendidikan sejarah, pendidikan agama, IPS dan pendidikan kewarganegaraan.<sup>10</sup>

Sistem pembagian jurusan di kelas 4 didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: hasil belajar, psikometri (respon konselor). Bagi mahasiswa yang akan mengikuti prodi IPA memiliki kriteria matematis dan keilmuan yang menonjol dibandingkan mata kuliah lainnya, serta mendapatkan rekomendasi dari pembimbing agar layak dan mampu melanjutkan pendidikan di prodi IPA. Di satu sisi, ada beberapa kebijakan yang fleksibel. Artinya mahasiswa yang telah bergabung dengan jurusan tertentu masih diperbolehkan untuk mengembangkan ilmu dan keahlian di bidang lain dengan mengambil mata kuliah lintas minat. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap siswa dapat memilih maksimal 21 mata pelajaran, namun karena beberapa kendala di lapangan, beban dibatasi maksimal 18 mata pelajaran.

---

<sup>9</sup> Nila Setyani., Zuliyana, Fina., Rofitrasari., Amelia, 'Analisis Sistem Pendidikan Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL): Perspektif Guru', *Jurnal PGSD*, 14.1 (2021), 70–79 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/pgsd.14.1.70-79>>.

<sup>10</sup> Chichi Zakirman, Gusta Wienda & Rahayu, 'Deskripsi Sistem Divisi Jurusan Antara Sekolah Indonesia Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia', *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.6 (2021), 4083–93 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1231>>.

Negara Malaysia cenderung lebih maju di bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan negara Indonesia yang sering terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum sehingga pelaksana teknis di Indonesia lambat untuk berkembang.

### 3. Kebijakan Kurikulum Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya manusia dan pendidikan yang maju di dunia, terutama di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Singapura menjadi salah satu negara tujuan untuk menuntut ilmu. Keunggulan sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa yaitu (bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil)<sup>11</sup> dan kurikulum yang lengkap dimana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang Kindergarten School atau setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK) di Indonesia. Setelah lulus siswa melanjutkan ke jenjang Primary School atau setara dengan Sekolah Dasar (SD) selama enam tahun. Untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, siswa harus dilanjutkan ke jenjang Secondary School selama empat atau lima tahun. Di jalur ini, siswa mempelajari Bahasa Inggris dan Bahasa Ibu, Matematika, Sains dan Budaya ( Sosial ). Sekolah diijinkan untuk menawarkan *Applied Grade Subject* ( AGS )<sup>12</sup> sebagai tambahan atau pengganti kurikulum untuk menawarkan berbagai pilihan kepada siswa. AGS secara umum mengajak murid untuk berlatih atau berorientasi pada pendidikan seperti politeknik.

Kemajuan di Singapura didukung oleh banyak faktor. Diantaranya adalah adanya fasilitas yang memadai. Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas, juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orangtua.<sup>13</sup> Hal ini sangat jauh dengan Indonesia yang masih banyak wilayah dan sekolah yang kesulitan dalam akses internet. Di Singapura, biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Faktor lain yang membuat Singapura menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN. Selain itu, di setiap kelas terdapat Liquid Crystal Display (LCD) untuk proses pembelajaran. Fasilitas lainnya yaitu tersedianya sistem transportasi

---

<sup>11</sup> M. . Nasution, T. ., Khoiri, N. ., Firmani, D. W. ., & Rozi, 'Perbedaan Sistem Kurikulum Pendidikan Anggota Asean, Indonesia Dan Singapura', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.3 (2022), 1847–1958 <[http://repository.uinsu.ac.id/17395/1/4971-Article Text-17112-1-10-20220626.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/17395/1/4971-Article%20Text-17112-1-10-20220626.pdf)>.

<sup>12</sup> Rohyadi, Edi, Dewi, Ratna Sari dan Pertiwi.

<sup>13</sup> M&Asya'ri Ridlwan, 'Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar 3 Negara (Singapur, Jepang, Korea Selatan) Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia', *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 7.2 (2021), 141–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/pedagogi.v7i2.8859>>.

yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya.

Luaran (*outcome*) pendidikan yang diselenggarakan di negara Singapura bahwa negara Singapura yakin seorang yang berpendidikan adalah orang yang bertanggung jawab pada dirinya, keluarganya dan temannya. Seorang yang berpendidikan adalah juga seorang yang bertanggung jawab pada masyarakat dan negaranya. Maka dari upaya pendidikan Singapura menekankan pada salah satu karakter. Sehingga luaran (*outcome*) pendidikan Singapura peserta didik mampu membedakan benar dan salah, mampu belajar untuk berbagi dan mendahulukan orang lain, mampu membangun persahabatan dengan orang lain, mempunyai rasa ingin tahu tentang hal-hal baru, mampu berpikir dan menyatakan pendapat mereka, percaya diri/bangga dengan karya mereka, mampu menjaga kebiasaan hidup sehat dan mampu mencintai Singapura.

#### 4. Kebijakan Kurikulum Korea Selatan

Secara umum sistem pendidikan di Korea Selatan terdiri dari empat jenjang pendidikan formal yaitu : Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, SLTA dan pendidikan tinggi. Keempat jenjang pendidikan ini adalah: *grade* 1-6 (SD), *grade* 7-9 (SLTP), 10-12 (SLTA), dan *grade* 13-16 (pendidikan tinggi/program S1), serta program pasca sarjana (S2/S3). Hal ini sama dengan sistem kurikulum di Indonesia. Adapun sumber pendidikan dari pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah dan dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan.<sup>14</sup> Reformasi kurikulum pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi, adapun yang dikerjakan oleh guru meliputi lima langkah yaitu : perencanaan pengajaran, diagnosis murid, membimbing siswa belajar dengan berbagai program, tes dan menilai hasil belajar. Di sekolah tingkat menengah tidak diadakan tes masuk hal ini dikarenakan ada kebijakan *equal accesibility* atau kesetaraan untuk melanjutkan ke sekolah menengah di daerahnya. Sistem ini hampir sama dengan pelaksanaan kurikulum di Indonesia.

Sekolah di Korea Selatan gratis dan wajib bagi anak usia mulai 6-12 tahun, sehingga 98,8% anak Korea Selatan ikut serta di Sekolah Dasar. Tujuannya adalah memberi kesempatan belajar kepada semua anak usia sekolah dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas kepada masyarakat Meningkatkan pendidikan untuk semua

---

<sup>14</sup> Ismail Eka Wijaya, 'Studi Komparatif Pendidikan Di Kawasan Asia (RRC, Korea Selatan, Jepang)', *Educare Jurnal Pendidikan Dan Budaya*, 5.1 (2007), 48-66 <<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2959334&val=26372&title>>.

masyarakat dengan mengembangkan system pendidikan tinggi berkelanjutan bagi anggota masyarakat yang sudah bekerja, sejalan dengan system pendidikan tradisional. Dan kurikulumnya terdapat pelajaran yang di antaranya Pendidikan Moral, Bahasa Korea, Ilmu Sosial, Aritmatika, Sains, Musik, Olah raga, Kerajinan dan Kegiatan Ekstra Kurikuler.<sup>15</sup> Dalam proses belajar mengajar terdapat unsur gaya pembelajaran melalui ceramah, kerja kelompok, penggunaan media *audio visual* dan dialog dengan siswa.

## 5. Kebijakan Kurikulum Jepang

Tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan di Indonesia yaitu dengan menggunakan sistem 6-3-3 (enam tahun SD, tiga tahun SMP, tiga tahun SMA) dan Perguruan Tinggi. Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama digolongkan sebagai *Compulsory Education* dan Sekolah Menengah Atas digolongkan sebagai *Educational Board*.<sup>16</sup> Di Jepang pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas satu secara otomatis akan naik ke kelas dua, demikian seterusnya. Ujian akhir juga tidak ada, karena SD dan SMP masih termasuk kelompok *compulsory education*, sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP. Selanjutnya siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi kali ini mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar, artinya soal ujian dibuat oleh *Educational Board*.

Kurikulum sekolah ditentukan oleh menteri pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh dewan pendidikan distrik dan kota. Pada semua tingkat pendidikan di Jepang harus menempuh berbagai ujian yang merupakan syarat untuk naik kelas atau untuk mendapatkan ijazah. Bagi siswa yang kehadirannya kurang dari 5 % di tahun belajar dan hasil ujian jelek maka diwajibkan untuk mengulang pada level yang sama. Kurikulum disusun oleh sebuah komite khusus dibawah kontrol kementerian pendidikan. Komisi kurikulum terdiri dari praktisi dan pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri dan wakil komite khusus. Komisi ini bertugas mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam fundamental *education law* lalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Pembaharuan kurikulum Jepang setiap 10 tahun sekali. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia yang sering berubah dalam kebijakan kurikulumnya.

---

<sup>15</sup> Rohyadi, Edi, Dewi, Ratna Sari dan Pertiwi.

<sup>16</sup> Ikuzo, 'Sistem Kurikulum Pendidikan Di Jepang', *Goikuzo.Com*, 2020 <<https://goikuzo.com/sistem-kurikulum-pendidikan-di-jepang/>> [accessed 20 April 2024].



Beberapa peraturan yang *mandatory* bagi semua sekolah yaitu *School Education Law* menyangkut juga penentuan tujuan pendidikan (*goals and aims*), lama waktu per jenjang pendidikan dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan penentuan dan penggunaan buku teks untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ditentukan oleh *Monbusho (Ministry of Education)*. Disain kurikulum dan standar nasional jam belajar efektif, dilakukan oleh *code* sebagai bentuk dalam implementasi undang-undang. Sertifikat guru dilaksanakan oleh *Personnel Certification Law*.<sup>17</sup>

## 6. Kebijakan Kurikulum Finlandia

Negara Finlandia penulis pilih sebagai bahan perbandingan kebijakan kurikulum karena negara ini secara global telah diakui memiliki sistem kurikulum pendidikan yang sangat baik. Finlandia mempunyai sistem pendidikan dunia yang bagus karena konsistensi kurikulum dan kebijakannya yang lebih dari 40 tahun walaupun pemerintahan negara berubah. Kebijakan kurikulum dan pendidikan di China, Korea Selatan, dan Singapura juga memiliki konsistensi seperti yang diimplementasikan Finlandia.<sup>18</sup> Berbeda dengan Indonesia yang cenderung tentatif dan berubah-ubah seingga spontan komentar publik menyatakan ‘ganti menteri, ganti kurikulum’, komentar yang demikian tidak dapat dihindari karena fakta kurikulum pendidikan Indonesia sering berubah dari waktu ke waktu dan perubahan tersebut terjadi ketika adanya pergantian menteri di Indonesia.

Kebijakan pendidikan Finlandia menganut tanpa tes. Tidak ada ujian nasional sampai siswa menyelesaikan sekolah menengah. Pendidikan mengikuti matrekulasi untuk ujian masuk ke perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan di Indonesia selalu menggunakan ujian evaluasi, misalnya ujian harian, ujian blok, ujian tengah semester, ujian umum/*upgrade* kelas dan ujian nasional. Finlandia cenderung mengimplemtasikan kebijakan promosi. Guru selalu membantu siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran yang tertinggal agar semua siswa bisa naik level/kelas dengan baik.<sup>19</sup> Sebaliknya Indonesia mengimplementasikan kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang menyebabkan siswa sering gagal mengikuti ujian remedial dan masih ada di kelas yang sama atau tidak naik kelas. Pemberikan pekerjaan rumah (PR) di Indonesia dianggap

---

<sup>17</sup> Dinn Wahyudin, ‘Analisis Kurikulum: Studi Komparatif Pengembangan Kurikulum Di Jepang Dan Indonesia’, *Inovasi Kurikulum*, 1.1 (2004), 34–48 <<https://ejournal.upi.edu/index.php/JIK/article/download/35610/15125>>.

<sup>18</sup> Putra, Irdhan Epria Darma, Rusdinal, Dan Gistituati.

<sup>19</sup> Ashok Federick, ‘Finland Education System’, *International Journal of Science and Society*, 2.2 (2020), 21–32 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i2.88>>.

berperan penting untuk memberikan disiplin siswa rajin belajar. Sebaliknya Finlandia beranggapan bahwa PR bisa ditoleransi dengan maksimal diberikan waktu setengah jam selama anak belajar di rumah.

Kualifikasi guru Indonesia mensyaratkan sarjana dengan nilai cukup sedangkan Finlandia menerima calon guru berasal dari sepuluh besar lulusan Universitas di Finlandia diterima menjadi guru. Indonesia memaksakan guru membuat silabus dan rencana pembelajaran (RPP) atau di era kurikulum merdeka berubah namanya menjadi Modul Ajar mengikuti model dari pemerintah pusat maupun daerah melalui pengawas sekolah. Sementara di Finlandia guru bebas memilih bentuk atau model persiapan mengajar dan memilih metode dan buku teks sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan.

Kompetensi guru di Indonesia masih sangat kurang. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru dalam penerapan pembelajaran, serta minimnya akses sarana prasarana di sekolah, sehingga dalam proses pembelajarannya guru cenderung menggunakan metode ceramah yang bagi sebagian besar siswa membosankan. Sementara, di Finlandia sebagian besar guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui penerapan pembelajaran aktif dan siswa belajar berdasarkan kelompok kecil. Motivasi instrinsik siswa merupakan kunci keberhasilan dalam belajar. Dengan begitu guru perlu mempunyai banyak keterampilan guna mengajar lebih banyak siswa. Pendidikan Finlandia berfokus pada pemecahan masalah dalam ilmu sains. Hal ini karena di masing-masing kelas telah tersedia sarana prasarana pendidikan yang sangat memadai.

Sistem pendidikan Finlandia menerapkan sistem kesetaraan dengan mengutamakan penilaian terstruktur dalam setiap pertemuan, pembagian rapor dan pemberian beban tugas kepada peserta didik. Siswa membuat sendiri target capaian pembelajaran sendiri yang dibantu oleh orang tua mereka. Reformasi sekolah mewujudkan dan membantu Finlandia menjadi negara dengan prestasi akademik yang kuat, termasuk pada bimbingan dan konseling sekolah. Konseling sekolah ini didesain untuk membantu siswa belajar di level sekolah menengah dengan melanjutkan sekolah menengah dengan kejuruan pendidikan. Program konseling ini mempunyai kontribusi pada tingkat kelulusan siswa di negara tersebut. Siswa dibantu dengan menjembatani untuk memiliki hubungan antara sekolah dan pekerjaan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> N Leni, 'Faktor Yang Membuat 7 Negara (Finlandia, Korea Selatan, Hongkong, Jepang, Singapura, Belanda, Kanada) Diakui Memiliki Sistem Pendidikan Terbaik Di Dunia Dalam Kajian Antropologi Dan

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi perkembangan belajar anak. Biaya kuliah, pengajaran, buku pelajaran, transportasi sekolah, dan makan selama 9 tahun tingkat pendidikan di sekolah umum disediakan secara gratis. Bantuan dalam bentuk bimbingan belajar, medis, atau bantaun bagi siswa berkebutuhan khusus ke sekolah luar biasa. Dasar tujuan ini untuk penyelenggaraan pendidikan dasar yang ditetapkan oleh kurikulum inti nasional.

### C. Simpulan

Ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara lain tetap menjadi tugas utama bagi pemerintah dalam membuat regulasi kebijakan kurikulum. Sebagai bangsa yang terdiri dari beribu pulau dengan segala potensi daerahnya masing-masing, sangat perlu dilakukan pembaharuan dalam pendidikan, baik sarana prasaranya, kompetensi guru dan kepemimpinan pemerintahnya. Mengacu pada negara Singapura, yang notabene negara tetangga yang dekat, Korea Selatan dan Jepang yang menduduki peringkat tinggi di Asia Timur, memiliki komitmen kuat dalam peningkatan terhadap sumber daya manusianya melalui pendidikan, maka ini menjadi bahan bagi pemerintah Indonesia untuk terus berbenah. Negara yang maju tidak bisa dipisahkan dari penduduknya yang berpendidikan. Jika tidak ada manipulasi dalam pendidikan dan upaya pembaharuan terus menerus dengan menggunakan berbagai sumber, maka pendidikan yang ada khususnya di Indonesia akan sejalan dengan cita-cita bangsa.

### Referensi

- Federick, Ashok, 'Finland Education System', *International Journal of Science and Society*, 2.2 (2020), 21–32 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i2.88>>
- Ikuzo, 'Sistem Kurikulum Pendidikan Di Jepang', *Goikuzo.Com*, 2020 <<https://goikuzo.com/sistem-kurikulum-pendidikan-di-jepang/>> [accessed 20 April 2024]
- Leni, N, 'Faktor Yang Membuat 7 Negara (Finlandia, Korea Selatan, Hongkong, Jepang, Singapura, Belanda, Kanada) Diakui Memiliki Sistem Pendidikan Terbaik Di Dunia Dalam Kajian Antropologi Dan Matematika', in *Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika* (Lampung: radenintan.ac.id, 2019), pp. 219–229 <<https://proceedings.radenintan.ac.id/index.php/pspm/article/view/56>>
- Nasution, T. ., Khoiri, N. ., Firmani, D. W. ., & Rozi, M. ., 'Perbedaan Sistem Kurikulum Pendidikan Anggota Asean, Indonesia Dan Singapura', *Jurnal Pendidikan Dan*

- Konseling*, 4.3 (2022), 1847–1958 <<http://repository.uinsu.ac.id/17395/1/4971-Article-Text-17112-1-10-20220626.pdf>>
- Nurhuda, Hengki, ‘Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan’, *Dirasah Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar*, 5.2 (2022), 127–37 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51476/dirasah.v5i2.406>>
- Putra, Irdhan Epria Darma, Rusdinal, Dan Gistituati, Nurhizrah, ‘Perbandingan Kurikulum Pendidikan Indonesia Dan Finlandia’, *Journal on Education*, 6.1 (2023), 7436–48 <<http://jonedu.org/index.php/joe>>
- Putra, Armansyah, ‘Mengkaji & Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika Dan Finlandia)’, *Osf.Io*, 2017 <<https://osf.io/preprints/inarxiv/vdz32/download>> [accessed 18 April 2024]
- Ridlwan, M&Asya’ri, ‘Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar 3 Negara (Singapur, Jepang, Korea Selatan) Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia’, *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 7.2 (2021), 141–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/pedagogi.v7i2.8859>>
- Rohyadi, Edi, Dewi, Ratna Sari dan Pertiwi, Gadis Nianti, ‘Analisis Perbandingan Kurikulum Negara Indonesia Dengan Negara Lain’, *Jurnal IKA PGSD*, 14.2 (2023), 187–94 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36841/pgsdunars.v14i2.3895>>
- Setyani., Zuliyana, Fina., Rofitrasari., Amelia, Nila, ‘Analisis Sistem Pendidikan Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) : Perspektif Guru’, *Jurnal PGSD*, 14.1 (2021), 70–79 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/pgsd.14.1.70-79>>
- Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015)
- Ulinniam, Sarwo Edy, & Sumarta, ‘Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Indonesia Dari Masa Ke Masa (Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional)’, *Jurnal Sinau*, 9.1 (2023), 127–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37842/sinau.v9i1.141>>
- Wahyudin, Dinn, ‘Analisis Kurikulum: Studi Komparatif Pengembangan Kurikulum Di Jepang Dan Indonesia’, *Inovasi Kurikulum*, 1.1 (2004), 34–48 <<https://ejournal.upi.edu/index.php/JIK/article/download/35610/15125>>
- , ‘Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Profesi Guru (Studi Kasus Di Universitas Pendidikan Indonesia)’, *Jurnal Kependidikan*, 46.2 (2016), 259–70 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/jk.v46i2.11625>>
- Wijaya, Ismail Eka, ‘Studi Komparatif Pendidikan Di Kawasan Asia (RRC, Korea Selatan, Jepang )’, *Educare Jurnal Pendidikan Dan Budaya*, 5.1 (2007), 48–66 <<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2959334&val=26372&ti>>

tle>

Yanda, Sefri, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Kurikulum Pendidikan: Analisis Pendekatan, Tujuan Dan Fungsi, Serta Implikasinya Pada Pendidikan Islam', *Researchgate.Net*, 2023, pp. 11–26  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20571.34086>>

Zakirman, Gusta Wienda&Rahayu, Chichi, 'Deskripsi Sistem Divisi Jurusan Antara Sekolah Indonesia Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia', *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.6 (2021), 4083–93  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1231>>